

EDISI : Senin , 28 Januari 2019

KLIPING BERITA MEDIA CETAK KABUPATEN BULELENG



PENYUSUN :
SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
SETDA KABUPATEN BULELENG

Aset LPD Desa Pakraman Kubutambahan Capai Rp 26 M

Singaraja (Bisnis Bali) –

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan Buleleng melaksanakan kegiatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) di Wantilan Pura Desa Pakraman Kubutambahan, Sabtu (26/1). Dari laporan pertanggungjawaban tersebut LPD Kubutambahan melaporkan kepemilikan aset per 31 Desember 2018 yakni Rp 26.073.322.320, meningkat 5,61 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 24.687.215.338.

Dari kepemilikan aset tersebut, laba yang diperoleh mencapai Rp1.243.681.453. 20 persen dari dana itu yakni Rp248.736.291, disumbangkan untuk pembangunan desa. Menurut rencana Desa Adat Kubutambahan akan melaksanakan Ngaben Desa pada 2019 yang membutuhkan dana operasional diperkirakan mencapai Rp100 juta.

Nyoman Budiasa, S.E. Kepala LPD Desa Pakraman Kubutambahan mengatakan, meskipun dengan situasi pelambatan ekonomi dan persaingan antar lembaga keuangan di Desa Kubutambahan, pihaknya senantiasa memegang teguh kepercayaan masyarakat Desa Pakraman Kubutambahan untuk kemajuan LPD.

Menurutnya pemanfaatan laba LPD khususnya untuk dana pembangunan desa akan sangat penting untuk mendukung pembangunan dan perbaikan pura serta digunakan untuk kegiatan

sosial masyarakat seperti membantu operasional Ngaben Desa, Upacara Agama, santunan bagi krama desa linggih serta pemangku termasuk santunan bagi nasabah yang meninggal dunia.

“Perolehan laba ini yang 20 persennya kita anggarakan ke desa selain untuk membantu pembangunan desa juga untuk memotivasi masyarakat serta untuk meningkatkan rasa memiliki krama terhadap LPD,” jelasnya.

LPD Desa Pakraman Kubutambahan juga mem-

berikan tali kasih berupa sembako khusus untuk para lansia; para jompo yang kurang mampu, pemangku, pecalang dan krama desa linggih dengan jumlah total penerima mencapai 143 orang. “Tali kasih berupa sembako ini kita hitung perbanjar dari jumlah total 7 banjar,” terangnya.

Sementara itu Kelian Desa Pakraman Kubutambahan Jero Pasek Drs. Ketut Warkadea, M.Si. mengapresiasi perkembangan LPD dari 1991 hingga saat ini baik melalui simpan pin-

jam atau kredit. Karena peranan dan keberadaan LPD di Desa Kubutambahan betul betul dirasakan dalam peningkatan ekonomi khususnya permodalan usaha ekonomi produktif dan masyarakat yang membutuhkan.

“Ke depan kami berharap LPD ini mampu bertahan ditengah deraan persaingan antar usaha atau lembaga keuangan lainnya, kami optimis LPD ini mampu berkembang,” imbuhnya. ■ira



Kegiatan LPJ LPD Desa Pakraman Kubutambahan.

Nama Media: *Bisnis Bali*

Kategori: *Pajak*

Genjot Pendapatan Daerah, Pemkab Buleleng Rancang CRO



CRO - Pemasangan CRO dalam tahap uji coba.

Singaraja (Bisnis Bali) -

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Buleleng saat ini tengah merancang penerapan Cash Register Online (CRO) sebagai salah satu upaya dalam menggenjot penerimaan daerah dari sektor pajak restoran.

Mesin CRO merupakan alat yang langsung terkoneksi dengan perangkat tertentu (smartphone, komputer) yang sudah dipegang oleh pihak BKD. Dengan menggunakan jaringan seluler (GSM), casier pada

restoran tinggal memasukkan tagihan yang harus dibayar oleh pembeli pada mesin CRO, dengan demikian nilai nominal transaksi dan jumlah pajak yang harus dibayarkan secara *real time* dapat dipantau

oleh pihak BKD. Sistem ini diyakini mampu mencegah kebocoran penerimaan dari sektor pajak restoran. Sebagai tahap uji coba, BKD sendiri sekarang telah memasang mesin CRO pada 15 restoran dan rumah makan di Buleleng. Kepala BKD Bimantara, S.E., mengungkapkan tujuan penerapan CRO ini yaitu untuk memastikan pendapatan yang diterima oleh Pemkab Buleleng dari sektor pajak restoran tidak terjadi kebocoran, dan penerimaannya dapat meningkat. "Pemasangan paket CRO ini baru uji coba selama tiga bulan ke depan. Kalau ini (CRO) dapat meningkatkan pajak restoran, kami bisa kembangkan pemasangan ini, ungkap Bimantara.

Diakui Bimantara, dalam uji coba ini pihaknya masih memanfaatkan alat milik pihak ketiga dengan sistem menyewa. Dengan demikian tanggung jawab maintenance sepenuhnya ada pada vendor. Nantinya, bila alat ini dinilai bermanfaat, maka BKD akan memasang di seluruh restoran yang ada di Buleleng. Tapi ada beberapa restoran yang sudah menggunakan IT, mungkin itu tidak (dipasang). Begitu juga dengan yang sudah taat pajak, itu sudah tidak perlu lagi dipasang (CRO). Ini untuk yang menengah ke

bawah, yang kecil-kecil, tidak hanya restoran tapi juga rumah makan, kafe, dan lain sebagainya, lanjut Bimantara.

Sementara itu, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana yang juga hadir pada kegiatan tersebut mengungkapkan, bahwa penggunaan mesin CRO pada dasarnya adalah untuk membangun transparansi dengan suatu sistem.

Sekarang kami punya sistem yang cukup baik, yaitu CRO. Jadi orang belanja langsung teregister secara online, langsung bisa dilihat dari aplikasi yang dapat dipantau di kantor kapanpun, terang Agus Suradnyana.

Lanjut Bupati Agus, Pemkab Buleleng memperoleh keuntungan dengan sistem yang transparan ini. Selain itu, Pemkab Buleleng juga bisa melakukan forecasting (perkiraan) yang pasti tentang pendapatan daerah. Dengan sistem ini, menurutnya juga bisa memantau perkembangan wajib pajak. Kami bukan hanya ingin memungut pajaknya saja, namun kami juga melihat kalau dia turun (kewajibannya) apa sebabnya, kecenderungan apa yang harus kami perbaiki. Sehingga wajib pajak bukan hanya membayar pajaknya saja, tapi kami akan memberikan ruang (perbaikan), pungkasnya. ■